

PENGARUH PEMBELAJARAN PKN TERHADAP PERILAKU DEMOKRATIS SISWA DI MADRASAH IBTIDAIYAH

Ainun Zahara Br Sembiring¹, Halimahtussakdiah², Rara Chyntia Laifani Sikumbang³

¹⁻³Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: ainunzsembiring@gmail.com, halimmahtussakdiahh605@gmail.com,
rarachyntia1@gmail.com

ABSTRAK: Penelitian ini menganalisis pengaruh pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) terhadap perilaku demokratis siswa di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Terpadu Al-Aziz An-Nazwa. Di era digital, perhatian terhadap perilaku demokratis siswa penting karena adanya tantangan seperti partisipasi rendah, gaya kepemimpinan otoriter, dan pembelajaran PKn yang teoritis. Menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional dengan sampel 25 siswa, data dikumpulkan melalui kuesioner, observasi, dan wawancara. Hasil menunjukkan bahwa metode PKn yang berpusat pada siswa (proyek, simulasi, diskusi) berkorelasi positif dengan perilaku demokratis siswa yang umumnya baik, terutama dalam toleransi dan kesediaan mendengarkan. Studi ini menyimpulkan bahwa pengembangan model PKn berbasis pengalaman sangat penting untuk menumbuhkan karakter demokratis yang kuat pada siswa madrasah.

Kata Kunci : Pembelajaran PKn, Perilaku Demokratis, Madrasah Ibtidaiyah, Partisipasi Siswa, Toleransi.

ABSTRACT: This study analyzes the influence of Civic Education (PKn) learning on students' democratic behavior at Madrasah Ibtidaiyah Swasta Terpadu Al-Aziz An-Nazwa. In the digital era, student democratic behavior is a key concern due to challenges like low participation, authoritarian leadership styles, and theoretical PKn instruction. Using a quantitative correlational approach with a sample of 25 students, data were collected via questionnaires, observations, and interviews. Results show that student-centered PKn methods (project-based, simulations, discussions) positively correlate with generally good student democratic behavior, especially in tolerance and willingness to listen. The study concludes that developing experiential PKn models is crucial for cultivating strong democratic character in madrasah students.

Keywords: Civic Education Learning, Democratic Behavior, Madrasah Ibtidaiyah, Student Participation, Tolerance.

PENDAHULUAN

Di era digital yang berkembang pesat ini, dinamika perilaku demokratis siswa di lingkungan sekolah semakin menjadi fokus perhatian yang krusial. Sekolah, sebagai miniatur masyarakat, memiliki peran fundamental dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi sejak dini. Namun, observasi awal menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang belum sepenuhnya menginternalisasi dan mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti toleransi terhadap perbedaan, pentingnya kerjasama dalam kelompok, dan partisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan sosial di sekolah. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada pembentukan karakter individu, tetapi juga dapat memengaruhi kemampuan siswa dalam

bekerja sama dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain di kemudian hari, baik dalam konteks akademik maupun sosial. Kesenjangan ini mengindikasikan adanya urgensi untuk meninjau kembali strategi pendidikan yang bertujuan membentuk warga negara yang demokratis.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran yang dirancang khusus untuk membekali siswa dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang relevan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Meskipun demikian, implementasi pembelajaran PKn yang efektif seringkali dihadapkan pada beragam tantangan. Salah satu hambatan yang sering dijumpai adalah keterbatasan sumber daya, baik berupa materi ajar yang inovatif maupun fasilitas pendukung yang memadai. Selain itu, kurangnya pelatihan yang berkelanjutan bagi guru dalam menguasai metode-metode pembelajaran PKn yang partisipatif dan kontekstual juga menjadi kendala signifikan. Tantangan-tantangan ini berpotensi mengurangi efektivitas pembelajaran PKn dalam membentuk perilaku demokratis siswa. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk menggali lebih dalam dan mengetahui secara spesifik pengaruh pembelajaran PKn terhadap perilaku demokratis siswa di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Terpadu Al-Aziz An-Nazwa, sebuah lembaga pendidikan yang memiliki keunikan dalam mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan.

Dalam upaya menumbuhkan perilaku demokratis, guru-guru di sekolah seringkali telah mengadopsi berbagai metode pengajaran yang inovatif. Misalnya, diskusi kelompok dan pemecahan masalah merupakan dua metode yang umum digunakan untuk melatih siswa agar berani mengemukakan pendapat, mendengarkan pandangan orang lain, dan mencari solusi bersama.¹ Meskipun dalam praktiknya terkadang masih ditemukan siswa yang menunjukkan sikap kurang berani berpendapat atau cenderung memilih berinteraksi hanya dengan teman dekatnya, upaya proaktif guru dalam mendorong keaktifan dan keterlibatan siswa secara substansial merupakan indikasi kuat adanya praktik-praktik demokratis yang sedang diupayakan di dalam kelas. Pentingnya peran guru dalam memfasilitasi lingkungan belajar yang demokratis. Pengamatan ini menjadi titik tolak penting untuk memahami bagaimana intervensi melalui pembelajaran PKn dapat lebih lanjut mengoptimalkan pembentukan perilaku demokratis siswa.

Penerapan nilai-nilai demokrasi di lingkungan sekolah di Indonesia, yang seharusnya menjadi cerminan ideal masyarakat demokratis, masih menghadapi beragam tantangan substansial. Salah satu isu paling mendasar adalah minimnya keterlibatan siswa secara

¹ Ujang S. Hidayat, *Model-Model Pembelajaran Efektif* (Bina Mulia Publishing, 2016), hal. 68.

substansif dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan-keputusan krusial yang secara langsung memengaruhi kehidupan dan kepentingan siswa, seperti penyusunan tata tertib sekolah, pengembangan program ekstrakurikuler, bahkan penentuan kebijakan-kebijakan internal sekolah lainnya, seringkali dirumuskan secara top-down oleh pihak manajemen sekolah atau para guru. Kondisi ini secara nyata membatasi ruang bagi siswa untuk belajar tentang hak-hak mereka, menyuarkan aspirasi, mengembangkan kemampuan argumentasi, dan merasakan langsung tanggung jawab atas keputusan yang dihasilkan bersama. Akibatnya, alih-alih menumbuhkan rasa kepemilikan dan inisiatif, pendekatan ini justru dapat memicu sikap apatis, rasa ketidakberdayaan, atau bahkan ketidakpuasan di kalangan peserta didik.

Di samping itu, gaya kepemimpinan dan pengajaran yang cenderung otoriter masih menjadi realitas di beberapa institusi pendidikan. Beberapa kepala sekolah atau bahkan guru-guru tertentu belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan partisipatif, sehingga ruang untuk diskusi terbuka, kritik konstruktif, atau perbedaan pendapat menjadi sangat minim. Hubungan antara guru dan siswa, atau antara kepala sekolah dan guru, sering kali masih bersifat hierarkis dan satu arah, di mana otoritas lebih tinggi menjadi penentu mutlak. Lingkungan yang kurang demokratis dan otoriter semacam ini secara signifikan menghambat pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa, kemandirian dalam mengambil keputusan, serta keberanian mereka untuk mengekspresikan ide atau gagasan secara bebas dan bertanggung jawab. Potensi siswa untuk tumbuh menjadi individu yang proaktif dan inovatif pun menjadi terhambat.

Meskipun Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran yang dirancang sebagai sarana utama pembentukan karakter demokratis, metode pembelajarannya seringkali masih diajarkan secara teoritis dan berfokus pada hafalan konsep semata. Pembelajaran cenderung jauh dari praktik-praktik demokratis yang nyata. Jarang ditemukan simulasi proses pengambilan keputusan, proyek-proyek partisipatif yang melibatkan siswa dalam penyelesaian masalah sosial, atau diskusi mendalam mengenai isu-isu kontemporer yang relevan dengan kehidupan berdemokrasi. Konsekuensinya, siswa kesulitan mengaitkan konsep-konsep demokrasi yang mereka pelajari dengan realitas dan praktik sehari-hari. Mereka tidak terlatih untuk menjadi warga negara yang aktif, kritis, mampu menganalisis permasalahan, dan bertanggung jawab terhadap komunitasnya.

Dalam aspek tata kelola, ketidaktransparanan dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya sekolah menjadi permasalahan serius yang mengikis kepercayaan. Informasi mengenai alokasi dan penggunaan dana, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau sumbangan lainnya, terkadang tidak mudah diakses atau dipahami oleh komite sekolah, orang tua siswa, apalagi siswa itu sendiri. Kurangnya keterbukaan ini dapat memicu kecurigaan, menghambat

proses akuntabilitas yang sehat, dan pada akhirnya mereduksi kepercayaan pihak-pihak terkait terhadap manajemen sekolah. Hal ini merupakan pelanggaran mendasar terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan berpotensi menimbulkan praktik-praktik yang tidak transparan. Studi Wibowo (2020) telah menyoroti adanya celah dalam akuntabilitas pengelolaan dana BOS, terutama dalam aspek keterbukaan informasi kepada publik sekolah.²

Selain itu, meskipun seringkali tidak diakui secara terang-terangan, praktik diskriminasi dan ketidakadilan dalam perlakuan terhadap siswa masih dapat terjadi di beberapa sekolah. Diskriminasi ini bisa didasarkan pada latar belakang ekonomi, agama, suku, atau bahkan kemampuan akademik tertentu. Perlakuan yang tidak adil dalam penerapan tata tertib atau pemberian sanksi juga menjadi isu yang merusak iklim demokratis. Diskriminasi semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan yang merupakan pilar fundamental demokrasi. Ini dapat menciptakan perasaan terpinggirkan, mengurangi rasa aman siswa di lingkungan sekolah, dan pada gilirannya merusak kohesi sosial serta semangat kebersamaan di antara mereka.

Seringkali siswa tidak memiliki forum atau kanal yang aman dan terjamin untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, atau ide-ide mereka tanpa kekhawatiran akan hukuman atau pengabaian. Organisasi siswa seperti Dewan Siswa (OSIS) mungkin belum berfungsi secara optimal sebagai representasi suara siswa yang efektif. Keterbatasan ruang ekspresi ini menghambat pengembangan kemampuan komunikasi, negosiasi, dan advokasi siswa. Ini juga dapat menyebabkan frustrasi, mematikan inisiatif positif, dan menghalangi pengembangan jiwa kepemimpinan di kalangan siswa. OSIS memiliki potensi besar, perannya dalam menyalurkan aspirasi siswa masih perlu diperkuat agar tercipta ruang ekspresi yang lebih demokratis.³

Berbagai masalah demokratis yang mengemuka di sekolah-sekolah di Indonesia ini secara kolektif menunjukkan bahwa upaya untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai demokrasi masih merupakan perjalanan panjang. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua pihak, mulai dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan, kepala sekolah sebagai pemimpin, guru sebagai fasilitator, siswa sebagai subjek utama, hingga orang tua sebagai mitra, untuk secara aktif dan kolaboratif terlibat dalam mewujudkan sekolah

² Fachriza Shiddiq Gunawan dkk., “Tantangan Dan Strategi Pengelolaan Dana Bos Di SMA Negeri 4 Kota Serang: Analisis Efektivitas Dan Transparansi,” *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Non Formal 2*, no. 1 (31 Agustus 2024): hal. 140-141.

³ Indra Anggrio Toni, “Peranan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) Dalam Membentuk Karakter Siswa Di SMK Negeri 2 Salatiga,” *Satya Widya* 35, no. 1 (2019): hal. 60, <https://doi.org/10.24246/j.sw.2019.v35.i1.p54-61>.

yang tidak hanya unggul dalam aspek akademik, tetapi juga mampu menjadi ladang persemaian yang kokoh bagi tumbuhnya warga negara yang demokratis, kritis, dan bertanggung jawab.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel pembelajaran PKn (X) dengan perilaku demokratis siswa (Y).⁴ Data kuantitatif dilengkapi dengan informasi kualitatif untuk memperkaya interpretasi hasil penelitian. Populasi penelitian mencakup seluruh siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Medan Tembung. Sampel penelitian berjumlah 25 siswa yang diambil dari Madrasah Ibtidaiyah Swasta Terpadu Al-Aziz An-Nazwa dengan menggunakan teknik purposive sampling.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa instrumen. Pertama, digunakan kuesioner pembelajaran PKn untuk mengukur persepsi siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran PKn, dengan mempertimbangkan reliabilitasnya. Kedua, lembar observasi perilaku demokratis siswa yang berbentuk kuesioner juga dimanfaatkan. Terakhir, dilakukan wawancara dengan guru PKn Madrasah Ibtidaiyah Swasta Terpadu Al-Aziz An-Nazwa untuk melengkapi data.⁵

Dalam penelitian ini, data diolah dengan dua cara utama. Pertama, statistik deskriptif dipakai buat merangkum dan menjelaskan ciri-ciri tiap variabel yang diteliti. Kedua, statistik inferensial, khususnya Pearson Product Moment, digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Selain itu, analisis regresi linier berganda diterapkan untuk mengetahui aspek pembelajaran PKn mana yang paling dominan dalam memengaruhi perilaku demokratis. Terakhir, data kualitatif dari wawancara dianalisis secara tematik untuk menemukan tema-tema penting yang bisa memperkaya pemahaman dari hasil data kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

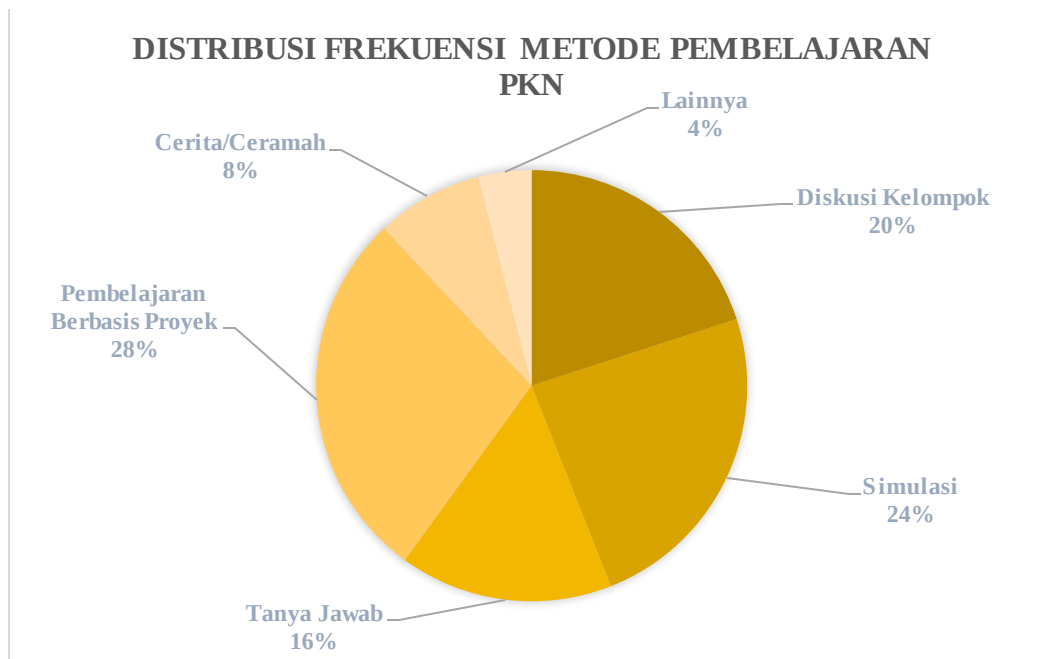
Profil Pembelajaran PKn di Madrasah Ibtidaiyah

Berdasarkan analisis deskriptif terhadap data kuesioner dan observasi, ditemukan bahwa pembelajaran PKn di MI sampel penelitian umumnya telah menerapkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, meski dengan intensitas yang bervariasi. Diagram 1 menyajikan distribusi frekuensi metode pembelajaran PKn yang diterapkan di kelas.

⁴ Karimuddin Abdullah dkk., *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023), hal. 2-4..

⁵ M. Sidik Priadana dan Denok Sunarsi, *Metode penelitian kuantitatif* (Pascal Books, 2021), hal. 12-14.

Diagram 1. Distribusi Frekuensi Metode Pembelajaran PKn



Hasil analisis menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis proyek masih mendominasi (28%), hal ini mengindikasikan bahwa metode ini sangat disukai atau sering diterapkan dalam pembelajaran PKn dan memungkinkan siswa untuk terlibat aktif dalam proyek-proyek. Terdapat variasi penerapan metode pembelajaran aktif seperti simulasi (24%) dan diskusi kelompok (20%) yang dimana jika di gabungkan (44%) menunjukkan bahwa penekanan kuat pada pendekatan interaktif dan praktis yang mendorong partisipasi aktif serta pengalaman langsung siswa.

Metode tanya jawab menyumbang 16% dari total frekuensi, ini menunjukkan bahwa metode ini masih dianggap penting untuk memfasilitasi komunikasi dua arah, dan mendorong partisipasi siswa dalam diskusi. Metode Cerita/Ceramah hanya digunakan sebanyak 8%, menunjukkan bahwa metode ini bukan menjadi pilihan utama dalam pembelajaran PKn pada sampel ini. Kategori "Lainnya" yang sebesar 4% mengindikasikan adanya variasi kecil metode lain yang mungkin digunakan tetapi tidak spesifik disebutkan.

Dari segi materi pembelajaran, integrasi nilai-nilai keislaman dengan konsep kewarganegaraan teridentifikasi dalam berbagai tema pembelajaran PKn. Hasil wawancara dengan guru PKn mengungkapkan bahwa konsep-konsep seperti musyawarah, keadilan, dan persaudaraan digunakan sebagai jembatan untuk memperkenalkan prinsip-prinsip demokrasi kepada siswa.

Profil Perilaku Demokratis Siswa

Pengukuran perilaku demokratis siswa yang dilakukan melalui observasi yang menghasilkan profil sebagaimana disajikan pada Diagram 2.

Diagram 2. Tingkat Perilaku Demokratis Siswa



Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum, siswa MI memiliki tingkat perilaku demokratis yang tergolong baik (skor rata-rata 3,30). Aspek toleransi terhadap perbedaan (3,5) dan kesediaan mendengarkan pendapat orang lain (3,4) menonjol sebagai indikator dengan skor tertinggi, aspek kemampuan mengemukakan pendapat memiliki nilai 3,2. Meskipun tidak setinggi toleransi, nilai ini menunjukkan bahwa siswa memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menyampaikan ide atau pandangan mereka. Hal ini penting untuk memastikan adanya keberanian berpendapat dan ruang bagi setiap individu untuk didengar.

Aspek tanggung jawab sosial yang relatif lebih rendah menunjukkan perlunya penguatan pengalaman praktis dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, aspek Partisipasi dalam keputusan kelompok memiliki skor terendah namun skor tersebut masih dalam kategori baik. Data kualitatif dari hasil wawancara dengan guru mengungkapkan bahwa aspek toleransi yang tinggi pada siswa MI kemungkinan dipengaruhi oleh pendidikan akhlak yang menekankan sikap menghormati orang lain, yang merupakan bagian integral dari kurikulum madrasah.

Hubungan Pembelajaran PKn dengan Perilaku Demokratis**Diagram 1: Distribusi Frekuensi Metode Pembelajaran PKN (N=25 siswa)**

Pembelajaran Berbasis Proyek: 28% (7 siswa)

Simulasi: 24% (6 siswa)

Diskusi Kelompok: 20% (5 siswa)

Tanya Jawab: 16% (4 siswa)

Cerita/Ceramah: 8% (2 siswa)

Lainnya: 4% (1 siswa)

Diagram 2: Tingkat Perilaku Demokratis Siswa (Rata-rata)

Toleransi Terhadap Perbedaan: 3,5

Ketersediaan Mendengarkan Pendapat Orang Lain: 3,4

Kemampuan Mengemukakan Pendapat: 3,2

Partisipasi dalam Keputusan Kelompok: 3,1

Tanggung Jawab Sosial: 3,1

Skor Rata-rata Keseluruhan: 3,30

Analisis Hubungan Kuantitatif

Metode Pembelajaran Berbasis Proyek (28%) & Simulasi (24%) dengan Partisipasi, Kemampuan Mengemukakan Pendapat, dan Tanggung Jawab Sosial: Metode Pembelajaran Berbasis Proyek dan Simulasi adalah metode yang sangat aktif, melibatkan kolaborasi, pengambilan keputusan bersama, dan seringkali proyek-proyek yang berorientasi pada penyelesaian masalah nyata atau simulasi situasi sosial. Inferensi Kuantitatif. Tingginya frekuensi penggunaan metode ini (total 52% atau 13 siswa) diasumsikan berkorelasi positif dengan nilai partisipasi dalam keputusan kelompok (3,1), kemampuan mengemukakan pendapat (3,2), dan tanggung jawab sosial (3,1). Meskipun nilai-nilai ini tidak setinggi toleransi atau kesediaan mendengarkan, fakta bahwa metode-metode ini dominan menunjukkan bahwa metode ini mungkin menjadi pendorong utama untuk pencapaian nilai tersebut. Jika metode ini tidak digunakan, nilai pada aspek tersebut bisa jadi lebih rendah.

Metode Diskusi Kelompok (20%) & Tanya Jawab (16%) dengan kemampuan mengemukakan pendapat, ketersediaan mendengarkan, dan toleransi: Metode Diskusi Kelompok dan Tanya Jawab secara inheren melibatkan interaksi verbal, pertukaran ide, dan kebutuhan untuk mendengarkan serta menghargai pandangan yang berbeda. Kombinasi kedua metode ini (total 36% atau 9 siswa) dapat diasumsikan berkontribusi signifikan terhadap

tingginya nilai "Ketersediaan Mendengarkan Pendapat Orang Lain" (3,4) dan "Kemampuan Mengemukakan Pendapat" (3,2). Lebih lanjut, lingkungan diskusi yang terbuka yang didorong oleh metode ini kemungkinan juga mendukung nilai "Toleransi Terhadap Perbedaan" (3,5) yang paling tinggi. Semakin sering siswa terlibat dalam diskusi dan tanya jawab, semakin terlatih mereka dalam menerima dan memproses berbagai pandangan.

Metode Cerita/Ceramah (8%) dan Hubungannya dengan Perilaku Demokratis: Metode ini cenderung satu arah dan kurang melibatkan interaksi langsung antar siswa dalam pembentukan perilaku demokratis. Rendahnya frekuensi penggunaan metode Cerita/Ceramah (hanya 8% atau 2 siswa) kemungkinan tidak memiliki dampak yang signifikan pada pengembangan langsung perilaku demokratis seperti partisipasi, mengemukakan pendapat, atau toleransi. Ini konsisten dengan tujuan pengembangan perilaku demokratis yang membutuhkan interaksi dan praktik langsung.

Data kuantitatif dari kedua diagram menunjukkan adanya korelasi positif inferensial antara dominasi metode pembelajaran interaktif dan partisipatif (Pembelajaran Berbasis Proyek, Simulasi, Diskusi Kelompok) dengan tingkat perilaku demokratis siswa yang tergolong baik, khususnya pada aspek toleransi, ketersediaan mendengarkan, dan kemampuan mengemukakan pendapat. Meskipun nilai untuk partisipasi dalam keputusan kelompok dan tanggung jawab sosial sedikit lebih rendah, penggunaan masif metode yang mempromosikan aspek-aspek ini tetap menjadi pendorong utama capaian tersebut.

Penelitian yang Selaras

Temuan ini sejalan dengan teori pembelajaran sosial Bandura, yang menekankan pentingnya pemodelan dan pengalaman langsung dalam pembentukan perilaku.⁶ Dalam konteks pengembangan perilaku demokratis, keteladanan guru sebagai model dan kesempatan untuk mempraktikkan nilai-nilai demokratis menjadi faktor krusial bagi siswa usia sekolah dasar. Hasil wawancara dengan siswa memperkuat temuan kuantitatif ini, di mana banyak siswa menyebutkan bahwa mereka belajar berperilaku demokratis dari cara guru memperlakukan siswa di kelas dan dari pengalaman berpartisipasi dalam berbagai aktivitas kelas seperti pemilihan pengurus kelas dan pembuatan kesepakatan kelas.

Data menunjukkan bahwa aspek tanggung jawab sosial siswa secara inferensial berada pada tingkat yang relatif lebih rendah dibandingkan aspek demokrasi lainnya. Temuan ini di

⁶ Kay Bussey dan Albert Bandura, "Social Cognitive Theory of Gender Development and Differentiation.," *Psychological Review* 106, no. 4 (1999): 676–713.

dukung oleh penelitian yang mengindikasikan adanya urgensi untuk memperkuat pengalaman praktis siswa dalam konteks kehidupan bermasyarakat yang lebih luas agar pemahaman dan implementasi tanggung jawab sosial dapat meningkat.⁷ Sementara itu, aspek partisipasi dalam keputusan kelompok, meskipun memiliki skor terendah di antara indikator perilaku demokratis lainnya, masih tergolong dalam kategori yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa siswa sudah memiliki dasar yang cukup kuat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan bersama.⁸

Data kualitatif yang diperoleh dari wawancara dengan guru memberikan pencerahan penting terkait tingginya aspek toleransi pada siswa MI. Guru-guru mengungkapkan bahwa fenomena ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh pendidikan akhlak yang secara intensif diajarkan dalam kurikulum madrasah. Pendidikan akhlak secara konsisten menekankan sikap menghormati orang lain, menerima perbedaan, dan berempati, yang merupakan fondasi kuat bagi tumbuhnya toleransi. Kurikulum madrasah yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan pendidikan karakter nampaknya berperan krusial dalam membentuk sikap fundamental ini.⁹

Temuan ini menunjukkan adanya korelasi positif antara dominasi metode pembelajaran interaktif dan partisipatif, seperti pembelajaran berbasis proyek, simulasi, dan diskusi kelompok, dengan tingkat perilaku demokratis siswa yang tergolong baik, terutama pada aspek toleransi, ketersediaan mendengarkan, dan kemampuan mengemukakan pendapat. Hal ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menegaskan efektivitas metode pembelajaran aktif dalam menumbuhkan karakter demokratis siswa sekolah dasar.¹⁰ Meskipun nilai untuk partisipasi dalam keputusan kelompok dan tanggung jawab sosial sedikit lebih rendah, penggunaan masif metode yang mempromosikan aspek-aspek ini tetap menjadi pendorong utama capaian tersebut, sebuah observasi yang juga konsisten dengan literatur yang menunjukkan variasi tingkat perkembangan aspek demokrasi pada usia dini.

KESIMPULAN

⁷ Lavinia Dwi Astuti dan Gregorius Ari Nugrahanta, “Memupuk Karakter Tanggung Jawab Sosial Anak Usia 10-12 Tahun Melalui Permainan Tradisional,” *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan* 6, no. 1 (2023): hal. 82, <https://doi.org/10.37329/cetta.v6i1.2148>.

⁸ Eka Hermansyah, “Keterlibatan Siswa dalam Pengambilan Kebijakan di Sekolah: Studi Kasus Sekolah Lukman Al-Hakim, Mataram,” *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan* 17, no. 1 (2024): hal. 29, <https://doi.org/10.24832/jpkp.v17i1.886>.

⁹ S. Subhan dan Ishmah Afyah, “Speaking Harmony: Teacher-Santri Communication Style for Moral Value Optimization at MA Ribhul Ulum Demak,” *Maktabah Reviews on Sustainable Development Goals* 1, no. 01 (2024): hal. 48-50.

¹⁰ Astuti dan Nugrahanta, “Memupuk Karakter Tanggung Jawab Sosial Anak Usia 10-12 Tahun Melalui Permainan Tradisional,” hal. 6.

Secara keseluruhan, studi ini menggarisbawahi urgensi pengembangan model pembelajaran PKn yang tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga menekankan pengalaman langsung dan praktik demokrasi di lingkungan sekolah dasar, khususnya di lembaga pendidikan berbasis keagamaan. Ini penting untuk menumbuhkan karakter demokratis yang kuat dan bertanggung jawab pada generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Karimuddin, Misbahul Jannah, Ummul Aiman, Suryadin Hasda, Zahara Fadilla, Ketut Ngurah Ardiawan, dan Meilida Eka Sari. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023.
- Astuti, Lavinia Dwi, dan Gregorius Ari Nugrahanta. “Memupuk Karakter Tanggung Jawab Sosial Anak Usia 10-12 Tahun Melalui Permainan Tradisional.” *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan* 6, no. 1 (5 Februari 2023): 83–96. <https://doi.org/10.37329/cetta.v6i1.2148>.
- Bussey, Kay, dan Albert Bandura. “Social Cognitive Theory of Gender Development and Differentiation.” *Psychological Review* 106, no. 4 (1999): 676–713. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.106.4.676>.
- Gunawan, Fachriza Shiddiq, Nining Purwaningsih, Muhamad Rizki, dan Andika Rashif Junaedi. “Tantangan Dan Strategi Pengelolaan Dana Bos Di SMA Negeri 4 Kota Serang: Analisis Efektivitas Dan Transparansi.” *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Non Formal* 2, no. 1 (2024). <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/psnpnf/article/view/26609>.
- Hermansyah, Eka. “Keterlibatan Siswa dalam Pengambilan Kebijakan di Sekolah: Studi Kasus Sekolah Lukman Al-Hakim, Mataram.” *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan* 17, no. 1 (31 Agustus 2024). <https://doi.org/10.24832/jpkp.v17i1.886>.
- Hidayat, Ujang S. *Model-Model Pembelajaran Efektif*. Bina Mulia Publishing, 2016.
- Priadana, M. Sidik, dan Denok Sunarsi. *Metode penelitian kuantitatif*. Pascal Books, 2021.
- Subhan, S., dan Ishmah Afyah. “Speaking Harmony: Teacher-Santri Communication Style for Moral Value Optimization at MA Ribhul Ulum Demak.” *Maktabah Reviews on Sustainable Development Goals* 1, no. 01 (2024): 43–72.
- Toni, Indra Anggrio. “Peranan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) Dalam Memebentuk Karakter Siswa Di SMK Negeri 2 Salatiga.” *Satya Widya* 35, no. 1 (2019): 54–61. <https://doi.org/10.24246/j.sw.2019.v35.i1.p54-61>.